

SEJARAH BANK INDONESIA : KELEMBAGAAN
Periode 1983-1997



Cakupan :

	Halaman
1. Sekilas Sejarah Kelembagaan Bank Indonesia Periode 1983-1997	2
2. Sejarah Kelembagaan BI	3
3. Struktur Direksi-Dewan Gubernur 1983-1997	4

1. Sekilas Sejarah Kelembagaan Bank Indonesia Periode 1983 - 1997

Perubahan kebijakan Bank Indonesia (BI) melalui deregulasi moneter dan perbankan tahun 1983 sampai dengan 1991 menuntut perubahan terhadap tata perbankan di Indonesia. Oleh karena itu, dilakukan perubahan atas Undang-Undang (UU) No. 14/1967 dengan UU No. 7/1992 tentang Perbankan. Berdasarkan UU No. 7/1992 tersebut, BI diberikan wewenang dalam penetapan tingkat kesehatan bank berdasarkan aspek permodalan, kualitas aset, kekuatan manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan bank.



Selain itu, UU Perbankan Tahun 1992 tersebut juga memberikan penegasan dan perluasan wewenang dalam penentuan batas maksimal pemberian kredit bagi seseorang atau kelompok debitur dan peran BI dalam pembinaan dan pengawasan bank, termasuk tindakan terhadap bank yang mengalami kesulitan dan membahayakan kelangsungan hidup bank tersebut.

Selama periode 1983-1997, BI pernah dipimpin oleh Arifin M. Siregar (1983-1988), Adrianus Mooy (1988-1993), dan J. Soedradjad Djiwandono (1993-1998).

Selama periode 1983-1997, dilakukan pembukaan beberapa kantor cabang (KC) yaitu KC Dili (24 Juli 1985), KC Padang Sidempuan (29 Januari 1987), KC Palangkaraya (11 Agustus 1982), dan KC Batam (12 Mei 1993).

2. Sejarah Kelembagaan BI

Dalam periode ini tugas pokok dan rincian tugas Bank Indonesia tidak mengalami perubahan landasan hukum, yaitu tetap berdasarkan UU No.13/1968 tentang Pokok-pokok Bank Indonesia dan UU No.14/1967 tentang Perbankan.

Dalam periode ini tugas pokok dan rincian tugas Bank Indonesia tidak mengalami perubahan landasan hukum, yaitu tetap berdasarkan UU No.13/1968 tentang Pokok-pokok Bank Indonesia dan UU No.14/1967 tentang Perbankan. Perubahan fundamental yang terjadi pada periode ini adalah dari segi pendekatan dan pola pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, karena dalam periode ini Bank Indonesia menerapkan kebijakan deregulasi di bidang moneter dan perbankan yang merupakan bagian dari program deregulasi dan debirokratisasi secara bertahap yang dilakukan oleh Pemerintah di sektor keuangan dan perekonomian pada umumnya.

Langkah deregulasi tersebut merupakan respon terhadap perkembangan eksternal dan internal yaitu kebutuhan untuk membangun sistem perbankan yang sehat, efisien dan tangguh, mampu menjangkau masyarakat yang terpencar di Nusantara serta mampu berkiprah secara internasional, dan upaya secara bertahap mengembalikan Bank Indonesia secara murni sebagai Bank Sentral.

Perubahan kebijakan mendasar yang dilakukan Bank Indonesia melalui kebijakan deregulasi di bidang moneter dan perbankan menuntut perlunya dilakukan penyempurnaan organisasi secara menyeluruh walaupun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Pendekatan yang digunakan adalah menyelaraskan arah sasaran Bank Indonesia dengan strategi, struktur, sistem, staff, keahlian, gaya manajemen dan upaya pembentukan budaya kerja. Dengan langkah tersebut, organisasi Bank Indonesia dari waktu ke waktu mengalami perubahan untuk penataan organisasi Bank Indonesia yang lebih baik.

Upaya lainnya adalah pengembangan Rencana Strategis (Renstra) Bank Indonesia untuk lebih menyelaraskan strategi dan peran Bank Indonesia dengan Repelita. Diawali dengan simulasi penyusunan Renstra Bank Indonesia 1984/89 dengan bantuan tenaga ahli dari *Federal Reserve*, disusul dengan penyusunan Renstra Bank Indonesia yang sesungguhnya untuk periode Repelita 1989/94 yang mencakup misi, strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Bank Indonesia. Penyusunan Renstra berlanjut dengan penyempurnaan sesuai perkembangan. Atas dasar Renstra tersebut, ditetapkan arahan tahunan Direksi Bank Indonesia yang dijadikan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.

2. Struktur Direksi-Dewan Gubernur 1983-1997













